



Dimensi
Epistemologis
dalam Indeginisasi
Ilmu-Ilmu Sosial di
Indonesia
(sebuah pelacakan awal)

■ Heri Santoso

Problematika Indigenisasi

Indigenisasi (Latin: *indegenous* = asli, pribumi) atau pempribumian ilmu-ilmu sosial merupakan issue yang sangat menarik dan masih menjadi bahan perdebatan di kalangan ilmuwan sosial di Indonesia sejak pertengahan tahun 1970-an. Indigenisasi diartikan sebagai pempribumian, atau proses penumbuhan ilmu dari bumi Indonesia atau meminjam teori asing yang kemudian disesuaikan dengan akar budaya Indonesia. Pengertian ilmu-ilmu sosial di sini lebih difokuskan pada sosiologi.

Issue indigenisasi lahir sebagai jawaban atas kritik yang dilontarkan pada ilmu-ilmu sosial di Indonesia yang terlalu didominasi oleh teori-teori Barat. Ilmuwan sosial Indonesia dikritik hanya pandai mengajarkan dan menerapkan teori asing tanpa mampu menciptakan teori yang khas Indonesia. Kritik lain yang turut memicu bergulirnya ide indigenisasi adalah karena ilmu-ilmu sosial Indonesia dinilai a-historis (Arief Budiman, 1983), artinya tercerabut dari sosio-historis dan kebudayaan pendukungnya.

Dewasa ini dengan maraknya pemikiran Post-modernisme dengan ciri pemikiran dekonstruktif, pluralistis dan relativistis, semakin memacu tumbuhnya budaya lokal termasuk ilmu-ilmu yang tidak didominasi oleh rasionalitas Barat. Post-modernisme menyemangati kebangkitan dan perkembangan kebudayaan-kebudayaan lokal sebagai alternatif bagi problematika manusia yang teralienasi dan terepresi oleh rasionalitas ilmiah Barat.

Indigenisasi, selain sebagai suatu konsep ilmiah, juga merupakan suatu proyek harapan bagi pengembangan ilmu-ilmu sosial di Indonesia yang oleh beberapa pengamat disinyalir telah mandeg dan terlalu didominasi oleh ideologi "pembangunanisme".

Problematika relevansi ilmu-ilmu sosial bagi masyarakat Indonesia selama ini diidentikkan dengan relevansi bagi Pembangunan Nasional. Ada dimensi-dimensi tertentu, terutama dimensi kritis, yang cenderung adaptif ketika ilmu-ilmu sosial hanya mengabdikan kepada kepentingan pembangunan. Pembangunan seakan-akan telah menjadi mitos, yang secara sadar atau tidak di dalamnya terkandung asumsi bahwa dengan pembangunan segalanya akan menjadi lebih baik. Pembangunan diasumsikan memuat nilai kebaikan,

sehingga terkadang mengorbankan manusia demi kepentingan pembangunan.

Menghadapi problema di atas ilmuwan sosial di Indonesia di satu pihak dituntut untuk segera menyusun konsep ilmu yang khas Indonesia, di lain pihak dihadapkan pada tantangan untuk mengatasi problema dan krisis-krisis pembangunan. Dalam hal ini indigenisasi selain diartikan sebagai upaya penciptaan teori-teori baru yang khas Indonesia, bisa juga diartikan sebagai kontekstualisasi teori-teori ilmu-ilmu sosial dari Barat guna menjawab tantangan masyarakat Indonesia tanpa harus bertentangan dengan budaya dan kepribadian bangsa Indonesia.

Mengingat kompleksitas konstelasi sebagaimana digambarkan di depan, maka dapat dirumuskan sejumlah permasalahan sebagai berikut: Bagaimana konsep indigenisasi dalam konteks perkembangan ilmu-ilmu sosial terutama sosiologi di Indonesia? Bagaimanakah corak epistemologi yang melandasi teori-teori sosial terutama teori-teori sosiologi di Indonesia?

Dimensi epistemologis dipilih sebagai sasaran kajian mengingat epistemologi merupakan sendi utama penyusunan teori dan metode ilmiah. Kajian tentang epistemologi merupakan sarana untuk mengkritik dan mengevaluasi validitas kebenaran ilmiah yang selama ini hampir tidak pernah dipermasalahkan oleh para ilmuwan. Di samping itu kajian ini sekaligus bermaksud menggali akar permasalahan yang dihadapi ilmu-ilmu sosial, terutama sosiologi, dan mencari alternatif pemecahannya.

Kajian ini dibatasi dari tahun 1960-an hingga dewasa ini dengan maksud untuk mendapatkan akurasi data dan menghindari kesulitan untuk melacak sumber bahan tentang perkembangan ilmu-ilmu sosial secara keseluruhan. Mengingat kajian ini bersifat filosofis, maka tidak harus mencari data langsung dari lapangan. Kendati demikian penulis merasa terbantu oleh adanya penelitian lapangan yang sudah dibukukan tentang perkembangan ilmu-ilmu sosial di Indonesia sampai dekade 80-an (Manasse Malo, ed., 1989). Tulisan Benny Subianto (1989) dengan judul, "Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia: Mencari Pendekatan dari Masa ke Masa", dalam PRISMA, No. 2 Th. XVIII juga sangat membantu pelacakan perkembangan ilmu-ilmu sosial Indonesia. Kajian

tidak akan berpretensi menguji validitas kebenaran penelitian tersebut, melainkan memanfaatkannya sebagai bahan bagi pemaknaan dimensi epistemologisnya.

Indigenisasi dalam Sejarah Perkembangan Ilmu Sosial di Indonesia

Perkembangan ilmu-ilmu sosial di Indonesia dapat dilacak dengan suatu periodisasi tertentu, misalnya: (1) Periode pra-1960-an: Pengaruh Indologi; (2) Periode 1960-an: Berkembangnya Teori-Teori Pembangunan; (3) Periode 1970-an: Berkembangnya issue indigenisasi ilmu-ilmu sosial; (4) Periode 1980-an: Berkembangnya Gugatan atas Dominasi Positivisme dan Strukturalisme Fungsional; (5) Periode 1990-an: Berkembangnya Perspektif Kritis.

Penulisan perkembangan ilmu-ilmu sosial berdasarkan periodisasi ternyata tak luput dari beberapa kesulitan, antara lain: pertama, kelemahan bawaan dari pendekatan periodisasi yang cenderung memotong-motong peristiwa sejarah. Padahal pada kenyataannya sejarah tidak bisa dipotong-potong menjadi bagian-bagian yang kaku dalam tahun-tahun, karena sejarah mengalir dari masa lalu, masa kini dan ke masa depan. Setiap fenomena kesejarahan senantiasa terkait dengan faktor-faktor lain. Periodisasi memang membantu membaca pola kecenderungan yang terjadi dalam periode tertentu, namun harus disadari hal itu hanyalah semacam peta untuk mempermudah pemahaman, bukan dimaksudkan sebagai pembakuan kenyataan faktual dalam sejarah.

Kesulitan kedua, rencana periodisasi di atas tampak terlalu memaksakan diri. Pembatasan tahun terasa kaku, sehingga sejarah dipaksakan untuk dikotak-kotakkan dalam periode tertentu. Issue indigenisasi memang berkembang pada pertengahan tahun 1970-an, namun tidak berarti belum ada usaha indigenisasi sebelum dan sesudah tahun tersebut.

Guna menghindari beberapa kesulitan di atas, peta perkembangan yang digunakan bersifat fleksibel dengan pendekatan semacam "pertumbuhan biologis". Penulis tidak berpretensi untuk menjustifikasi bahwa perkembangan ilmu-ilmu sosial di Indonesia memenuhi pola perkembangan biologis, namun pendekatan ini diambil sebagai alat bantu untuk lebih memahami fenomena sejarah perkembangan ilmu-ilmu sosial tanpa harus dibakukan dalam tahun-tahun

tertentu. Perkembangan biologis dapat digambarkan sebagai fase kelahiran, fase tumbuh kembang, fase remaja dan fase pendewasaan

1. Fase Kelahiran

Secara historis ilmu-ilmu sosial di Indonesia pada awalnya berasal dari Barat, terutama Belanda. Ketika Pemerintah Belanda hendak mengirim para calon administraturnya ke Indonesia, para calon administrator itu dibekali dengan pengetahuan kemasyarakatan tentang Hindia Belanda seperti hukum, geografi, etnologi, dan bahasa. Persiapan pembekalan ini dipusatkan di Leiden, dan akhirnya berkembanglah ilmu yang dinamakan indologi. Indologi dimaksudkan sebagai ilmu tentang Indonesia yang dipersiapkan bagi para calon administrator tersebut.

Di antara para administrator dan pemegang pemerintahan Belanda di Indonesia itu ternyata juga terdapat ilmuwan-ilmuwan, misalnya Snouge Hourgronye. Mereka itu sadar atau tidak telah mengembangkan ilmunya tentang masyarakat, hanya saja pengembangan itu demi kepentingan kolonial.

Ketika para pemuda Indonesia mendapat kesempatan belajar di negeri Belanda, di antara mereka terdapat beberapa kelompok sikap terhadap ilmu-ilmu kemasyarakatan ala Belanda itu. Sikap pertama adalah mereka yang kompromis dan menerima begitu saja ilmu yang didapatnya di Belanda untuk diterapkan di Indonesia. Kelompok kedua, ilmuwan yang bersikap mengambil teori-teori asing yang berkembang di dunia untuk kepentingan perjuangan kemerdekaan. Tidaklah mengherankan jika teori-teori yang diambil dimaksudkan untuk menghancurkan ideologi kolonial dan pengembangan ideologi nasionalis. Mereka banyak diinspirasi oleh perjuangan bangsa-bangsa lain dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kelompok pertama lebih tekun mendalami masalah penerapan teori sosial untuk kepentingan administrasi pemerintahan, sedangkan kelompok kedua lebih menekuni grand theories (teori-teori besar) untuk perjuangan kemerdekaan. Buah dari kedua kelompok tersebut terlihat dalam perdebatan BPUPKI dalam perumusan Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara di tahun 1945.

2. Fase Tumbuh Kembang

Setelah masa kemerdekaan, tepatnya tahun 1950-an ilmuwan Clifford Geertz menunjukkan perintisan suatu indigenisasi. Teori sosial yang semula berkembang adalah teori dualismenya J.H. Boeke yang membagi masyarakat ekonomi menjadi sektor prakapitalis (tradisional) dan sektor kapitalis (moderen). Kebanyakan negeri di Asia (termasuk Indonesia) tidak bisa berkembang karena masih berada pada masyarakat prakapitalis yang lebih menekankan aspek sosial dari pada aspek ekonomi.

Geertz mencoba membalikkan teori tersebut. Secara sederhana Geertz dapat dirumuskan sebagai berikut: Pertama, sektor moderen dan sektor tradisional pada dasarnya tidaklah terpisah, melainkan berhubungan erat secara asimetris. Kedua, sektor moderen mengambil keuntungan dari hubungan itu justru dengan menolong sektor tradisional untuk hidup. Ketiga, mandegnya sektor tradisional disebabkan oleh eksploitasi sektor moderen. Mentalitas pribumi yang disebut Boeke sebagai prakapitalis, dengan demikian, bukan merupakan sebab tetapi lebih sebagai akibat dari keterbelakangan ekonomis yang disebabkan oleh struktur yang eksploitatif. Mentalitas ini tidak harus dilihat sebagai suatu sifat antropologis tetapi sebagai suatu produk historis dari sistem pertanian kolonial. Singkatnya, para petani Jawa bukannya menjadi miskin karena enggan bekerja, melainkan sebaliknya mereka enggan bekerja karena terus-menerus menderita kemiskinan yang tampaknya tidak berkeputusan (Geertz, 1963; Kleden, 1987:19-20).

Geertz mengajarkan pada kita tentang adanya ideologi kepentingan kekuasaan kolonial di belakang suatu teori. Penelitian Geertz ikut memberi inspirasi bagi pemunculan teori yang didasarkan atas ideologi kebangsaan Indonesia.

Pada fase tumbuh kembangnya ilmu-ilmu sosial di Indonesia, ada beberapa fenomena yang menarik, di antaranya: Pertama, pendirian institusi-institusi pendidikan tinggi, misalnya Akademi Ilmu Politik Indonesia di Yogyakarta yang kemudian berafiliasi dengan Universitas Gadjah Mada. Ilmu-ilmu sosial masih didominasi oleh ilmu hukum. Ilmu-ilmu sosial masih berstatus sebagai mata kuliah pembantu dalam mata kuliah ilmu hukum. Pendirian institusi pendidikan ini lebih dimotori oleh para alumni pendidikan Belanda dari Leiden, sehingga corak pengembangan grand theories di satu

pihak dan kecenderungan feodalistik di lain pihak tidak bisa dihindarkan.

Fenomena kedua yang menarik adalah ketika para ilmuwan yang belajar di Amerika sudah kembali ke tanah air. Adalah suatu kebetulan sejarah, ketika para ilmuwan sosial Indonesia dikirim ke Amerika, pemikiran yang sedang berkembang di Amerika adalah positivisme dan pragmatisme. Uraian lebih lengkap tentang pengaruh Amerika dalam Dunia Intelektual Indonesia dapat dibaca dalam buku karya Nasir Tamara (1997). Pemikiran Amerika tersebut sadar atau tidak turut mempengaruhi pola pikir ilmuwan-ilmuwan Indonesia. Ada beberapa kecenderungan sikap, yaitu pertama ilmuwan yang langsung menerapkan ilmunya guna memecahkan persoalan kemasyarakatan tanpa mempermasalahkan apakah teori dan metode yang didapatnya di Amerika sesuai atau tidak dengan kondisi ke-Indonesia. Kelompok kedua adalah ilmuwan yang mencoba merefleksikan kembali teori dan metode yang didapatnya karena pada kenyataannya didapati kesulitan-kesulitan ketika diterapkan di Indonesia. Kelompok kedua ini yang bisa dikategorikan dalam pengembang ide indigenisasi.

Pada fase ini, ilmu-ilmu sosial juga dihadapkan pada masalah pencarian jati diri membedakan antara disiplin ilmu yang satu dengan lainnya. Pemisahan antara disiplin sosiologi, sejarah dan antropologi dari dominasi administrasi, politik dan hukum mulai diperdebatkan. Fase ini merupakan fase pencarian jati diri, yaitu pengembangan institusi sekaligus pengembangan teori dan metode yang membedakannya dengan disiplin lain yang sudah mapan seperti hukum dan ekonomi.

3. Fase Remaja

Pada tahun 1960-an, ketika ilmu-ilmu sosial belum tumbuh dan berkembang secara kokoh, baik secara institusional maupun secara teoritis, ternyata harus berhadapan dengan pengaruh politik untuk turut merancang konsep Pembangunan Nasional. Ilmu-ilmu sosial dituntut peranannya mengambil bagian dalam Pembangunan Nasional. Pada fase ini sebagai lanjutan fase sebelumnya. Bila fase sebelumnya merupakan fase pencarian jati diri, pada fase ini pencarian jati diri lebih dipertegas lagi ketika terjadi semacam pembagian tugas antara berbagai disiplin ilmu.

Masalah utama pada fase ini adalah siapakah yang harus mengambil peranan utama atau sebagai ujung tombak perumusan konsep pembangunan. Ketika pada masa sebelum tahun 1965-an, orientasi pembangunan pada bidang politik dinilai tidak berhasil maka orientasi pembangunan dipertanyakan kembali. Pada tahun 1967 berkumpul ilmuwan sosial sebagai team perancang Pembangunan Nasional yang dipimpin Prof. Widjojo Nitisastro yang beranggotakan Prof. Sadli, Ali Wardana, Subroto, dan Prof. Sarbini Soemawinata dan Selo Soemardjan. Ilmuwan tersebut sebagian besar berlatar belakang ekonomi, sedangkan yang non-ekonomi hanya Selo Soemardjan yang berlatar belakang sosiologi (Selo Soemardjan, dalam PRISMA, 1994: 42). Pertanyaan yang muncul adalah bidang apa yang menjadi prioritas utama Pembangunan Nasional? Selo lebih menekankan bidang manusia dan masyarakat sebagai aktor pembangunan, sedangkan para ekonom lebih menekankan bidang ekonomi karena kondisi ekonomi pada masa itu berantakan.

Perdebatanpun berakhir dengan kemenangan di pihak para ekonom, hingga ditetapkan dan dijalankan pembangunan yang lebih menitik beratkan sektor ekonomi. Kenyataan ini menuntut ilmu-ilmu sosial non-ekonomi mengambil peran pembantu. Peran yang dimainkan ilmuwan sosial non-ekonomi mau tidak mau sebagai berada pada barisan kedua untuk menunjang pembangunan ekonomi. Pembagian kerja ternyata melahirkan pembagian bidang kajian dan pengembangan spesifikasi teori dan metode masing-masing ilmu-ilmu sosial. Ekonomi sebagai panglima mempelajari sektor-sektor produksi yang menopang pembangunan. Politik berorientasi pada stabilitas yang mengamankan pembangunan ekonomi. Sosiologi memfokuskan diri pada kajian kemasyarakatan yang sifatnya nasional, seperti lembaga-lembaga kemasyarakatan, masalah keluarga berencana, urbanisasi dan transmigrasi. Antropologi memfokuskan diri pada kajian kehidupan masyarakat yang lebih bersifat lokal dan etnis tertentu, dengan cara menggali budaya yang mendukung pembangunan, dengan cara mengarahkan dari cara berpikir tradisional ke cara berpikir moderen.

4. Fase Pendewasaan

Pada fase ini ditandai dengan diterbitkannya buku-buku terjemahan dari teori-teori neo-Marxian terutama Teori Kritis Mazhab Frankfurt dan fenomenologi. Nama-nama Adorno, Horkheimer, Herbert Marcuse dan Habermas sebagai filsuf-filsuf Teori Kritis sering dirujuk untuk mengkritik konsep-konsep pembangunan di Indonesia. Nama-nama lain seperti Schleiermacher, Dilthey, dan Gadamer mulai disebut-sebut dalam pembicaraan hermeneutika. Fase ini bisa diartikan peminjaman teori asing untuk mengkritik teori yang sudah ada, terutama teori-teori yang didominasi pemikiran positivisme.

Selain adopsi dari teori asing, ada sebagian sarjana Indonesia mulai sadar perlunya menumbuhkan teori yang digali dari bumi Indonesia, terutama yang digali dari Pancasila. Di antara tawaran tersebut antara lain: Hidayat Nataatmaja (1983) menawarkan gagasan Pemikiran ke arah Ekonomi Humanistik. Fakultas Filsafat UGM pernah mengadakan seminar yang akhirnya menawarkan gagasan Pancasila sebagai Orientasi Pengembangan ilmu di Indonesia (Soeroso H. Prawirohardjo, dkk. ed., 1987). Mubyarto (1987) menawarkan konsep Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinannya.

Sementara itu ilmuwan-ilmuwan Islam mulai menawarkan konsep ilmu-ilmu sosial yang digali dari kitab suci. Nurcholis Majid, Koentowijoyo, dkk. bisa dikategorikan dalam kelompok ini. Usaha ini merupakan langkah maju, namun belum bisa maksimal. Artinya belum ada realisasi pengembangan dari ide tersebut menjadi paradigma yang akhirnya diterima oleh komunitas ilmuwan secara luas dan akhirnya mampu melahirkan teori-teori baru.

Pada akhir-akhir ini munculnya pemikiran Postmodernisme dan Postsrtukturalisme dengan tokoh-tokoh seperti Foucoult dan Derrida sering dijadikan referensi untuk mengkritik kemapanan teori ilmu-ilmu sosial. Pemikiran ini membawa angin baru untuk menyadarkan kembali ilmuwan sosial dengan kelemahan-kelemahan perangkat ilmiahnya. Perkembangan ilmu-ilmu sosial selanjutnya masih merupakan "PR" buat kita bersama.

Melacak Corak Epistemologi dalam Indigenisasi Ilmu-Ilmu Sosial di Indonesia

Pengkajian historis tentang perkembangan ilmu-ilmu sosial di Indonesia telah membantu untuk menjelaskan corak-corak pemikiran epistemologinya. Penggambaran corak epistemologi ini mengalami beberapa kesulitan, disebabkan antara lain: Pertama, Ilmuwan sosial di Indonesia cenderung tidak mengemukakan dengan jelas asumsi dasarnya sehingga kesulitan melacak corak epistemologinya. Berbeda halnya dengan ilmuwan di Barat yang berani dengan tegas menyatakan asumsi dasarnya. Kedua, Ilmuwan sosial di Indonesia cenderung eklektif, dengan mencomot teori satu dengan teori yang lain tanpa mempertimbangkan asumsi dasarnya. Perkembangan ilmu-ilmu sosial di Indonesia lebih pada ilmu terapan bukan ilmu teoritis. Pembahasan ilmu lebih diarahkan pada penerapan ilmu bukan pada pengembangan tubuh pengetahuan. Ketiga, di Indonesia belum berkembang komunitas-komunitas ilmuwan sosial yang memiliki aliran-aliran yang khas. Sehingga jarang terjadi perdebatan yang lebih bersifat metodologis dari aliran yang berbeda, sebagaimana terjadi di Jerman antara kubu Positivisme dan Teori Kritis.

Kesulitan di atas menyebabkan penggambaran corak epistemologi yang berkembang dalam ilmu-ilmu sosial di Indonesia hanya berupa pola-pola kecenderungan saja, dan inipun masih bersifat hipotetik. Namun satu hal yang jelas adalah adanya hubungan antara "kepentingan" (ideologis dan kekuasaan) ilmu-ilmu sosial. Hubungan ini ditunjukkan pada masa Belanda adalah untuk kepentingan penguasa Belanda, pada masa perjuangan demi kepentingan kemerdekaan, dan pada masa pasca kemerdekaan demi kepentingan pembangunan.

Ditinjau dari sosiologi pengetahuan, teori sosial yang berkembang hanya teori-teori tertentu khususnya teori yang mendukung pembangunan dan kurang berkembangnya teori-teori kritis (Lambang Trijono, 1995). Nasikun (dalam UNISIA, No. 32/XVII/1997) mensinyalir perkembangan sosiologi di Indonesia selama ini sangat dikuasai oleh suatu "monisme" epistemologis dan teoritis tertentu, sehingga positivisme dari Perancis dan stasisisme dari Amerika lebih mendominasi dari pada fenomenologi Jerman dan strukturalisme. Pandangan

tersebut juga didukung oleh Susetiawan (1995) yang mensinyalir kecenderungan corak positivistik dalam pemikiran ilmu-ilmu sosial.

Kajian sejarah di atas secara singkat mengisyaratkan bahwa corak epistemologi yang berkembang di Indonesia antara lain adalah corak epistemologi positivisme, strukturalisme fungsional, Weberianisme, fenomenologi, Neo-Marxianisme khususnya Teori Kritis Mazhab Frakfurt, dan terakhir Postmodernisme dan Post Strukturalisme. Selain itu juga berkembang corak pemikiran epistemologi Islam dan pemikiran yang digali dari Pancasila.

Perlu ditegaskan sekali lagi, bahwa corak-corak tersebut tidak mewujudkan diri dalam teori-teori mandiri, namun dicampur aduk, "dicomot sana-sini", sehingga tidak lagi menampilkan wujudnya sebagaimana teori di Barat.

Kajian di atas menunjukkan perlunya paradigma ilmu sosial baru yang didasarkan atas ideologi yang sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia. Paradigma baru tersebut diharapkan dapat dijabarkan dalam bentuk teori-teori ilmu sosial yang baru. Dalam perumusan paradigma baru ini, peran filsafat khususnya filsafat ilmu menjadi sangat penting. Filsafat ilmu diharapkan memberi refleksi kritis sekaligus mencarikan alternatif pemecahan masalah yang berkaitan dengan asumsi-asumsi dasar ilmu-ilmu sosial. Dengan demikian diharapkan tujuan ilmu yaitu meningkatkan kesejahteraan manusia akan mendekati kenyataan.

Kesimpulan

Indigenisasi atau pemribumian dimaknai sebagai pengadaptasian teori asing untuk memecahkan permasalahan ke-Indonesiaan dengan berbagai modifikasi. Sekaligus bermakna penggalian teori yang berasal dari bumi Indonesia. Dalam lintasan sejarah digambarkan bahwa corak epistemologi yang berkembang dalam ilmu-ilmu sosial di Indonesia sulit dilacak. Ada keterkaitan yang jelas antara ilmu-ilmu sosial dan kepentingan, terutama kepentingan kekuasaan. Pada pasca kemerdekaan ada kaitan erat antara ilmu-ilmu sosial dan kepentingan pembangunan. Corak epistemologi yang agak menonjol adalah positivisme. Positivisme tidak menjelma dalam bentuk aslinya seperti di Barat, melainkan sudah dimodifikasi dengan berbagai corak epistemologi lain seperti strukturalisme

fungsional, Weberianisme, Neo-Marxianisme, Teori Kritis Mazhab Frankfurt, pemikiran Islam, dan pemikiran Pancasila. Untuk mengatasi krisis yang terjadi dalam ilmu-ilmu sosial di Indonesia, tuntutan untuk membangun paradigma baru sudah tidak terelakkan lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Arief, 1983, "Ilmu-ilmu Sosial Indonesia A-Historis", dalam PRISMA, No.6. Th. XII, h.74-90.
- Kleden, Ignas, 1987, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, LP3ES, Jakarta.
- Malo, Manasse (ed.), 1989, *Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial di Indonesia sampai Dekade '80-an*, PAU Ilmu-Ilmu Sosial UI bekerjasama dengan Rajawali Press, Jakarta.
- Nasikun, 1997, "Domestikasi Peran Cendekiawan dan Perkembangan Sosiologi di Indonesia", dalam UNISIA, No. 32/XVII/IV/1997, h. 58-67.
- Prawirohardjo, Soeroso H., dkk., ed., 1987, *Pancasila Sebagai Orientasi Pengembangan Ilmu*, PT Badan Penerbitan Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta.
- Prisma, 1994, "Ilmu-Ilmu Sosial di Indonesia Mandeg? Wawancara dengan Selo Soemardjan", PRISMA, No.1 Th. XXIII, h. 37-50.
- Tamara, Nasir, 1997, *Mengkaji Indonesia: Pengaruh dalam Dunia Intelektual di Indonesia*, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta.
- Soemardjan, Selo, 1983, "Ilmu itu Netral dan Ilmuwan Harus Objektif", dalam PRISMA, No. 6. Th. XII, h.73-80.
- Subianto, Benny, 1989, "Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia: Mencari Pendekatan dari Masa ke Masa", dalam PRISMA, No. 2 Th. XVIII.
- Susetiawan, 1995, *Mencari Alternatif Memahami Fenomena sosial dan Kendala Perkembangan Ilmu Sosial di Indonesia*, makalah dalam Seminar Nasional dalam Lustrum VIII Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Trijono, Lambang, 1995, *Ilmu Sosial Kritis Reflektif: Eksplorasi Teoritik Mengatasi Krisis Pembangunanisme*, makalah dalam Seminar Nasional dalam Lustrum VIII Fisipol UGM, Yogyakarta.